Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025)
Tema/Edisi : Hukum Pemerintahan (Bulan Kedelapan)
https://jhlg.rewangrencang.com/

TINJAUAN HUKUM IMPLEMENTASI DANA DESA DI DESA BORO KECAMATAN SANGGAR KABUPATEN BIMA

LEGAL REVIEW OF VILLAGE FUND IMPLEMENTATION IN BORO VILLAGE, SANGGAR DISTRICT, BIMA REGENCY

Ebi Irawan, Erham dan Gufran

Universitas Muhammadiyah Bima

Korespondensi Penulis : ebiirawan099@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Irawan, Ebi, Erham dan Gufran. *Tinjauan Hukum Implementasi Dana Desa di Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

ABSTRAK

Dana Desa merupakan instrumen strategis untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, implementasinya sering terkendala aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Artikel ini mengkaji pelaksanaan program Dana Desa di Desa Boro, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, dari perspektif hukum dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil menunjukkan pelaksanaan belum optimal akibat lemahnya kapasitas aparatur dan minimnya partisipasi masyarakat. Prinsip transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya dijalankan. Diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas, serta pengawasan dan partisipasi masyarakat agar Dana Desa berdampak signifikan.

Kata Kunci: Dana Desa, Hukum Desa, Kesejahteraan, Partisipasi Masyarakat

ABSTRACT

The Village Fund is a strategic instrument to promote the development and welfare of rural communities, as stipulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. However, its implementation is often hampered by aspects of transparency, accountability, and community participation. This article examines the implementation of the Village Fund program in Boro Village, Sanggar District, Bima Regency, from a legal perspective using an empirical juridical approach. The results indicate that implementation is suboptimal due to weak apparatus capacity and minimal community participation. The principles of transparency and accountability have not been fully implemented. Regulatory strengthening, capacity building, and community oversight and participation are needed for the Village Fund to have a significant impact.

Keywords: Village Fund, Village Law, Welfare, Community Participation

A. PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas utama dalam strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan.[1] Desa sebagai entitas sosial dan administratif memiliki posisi strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pengelolaan sumber daya secara mandiri dan berbasis kearifan lokal.[2] Pemerintah Indonesia memperkuat posisi desa melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola keuangannya secara langsung, termasuk melalui program Dana Desa yang dialokasikan setiap tahun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2015, Dana Desa ditujukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.[3] Dalam implementasinya, Dana Desa dialokasikan kepada setiap desa dengan mekanisme penghitungan yang mempertimbangkan aspek pemerataan dan kebutuhan riil, seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, serta kesulitan geografis.

Penyalurannya dibagi ke dalam dua tahap: tahap pertama sebesar 60% pada awal tahun dan tahap kedua sebesar 40% pada pertengahan tahun, sesuai dengan peraturan teknis yang berlaku.[4] Pengelolaan Dana Desa menuntut partisipasi aktif semua pihak, mulai dari perangkat desa, pemerintah kecamatan dan kabupaten, hingga masyarakat. Idealnya, proses ini dimulai dari tahapan perencanaan melalui musyawarah desa yang inklusif dan aspiratif. Tahap ini menjadi wadah pengumpulan gagasan masyarakat mengenai prioritas pembangunan yang dibiayai Dana Desa.

---

[1] Astiani Selvia, *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Labotto Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone)*, Skripsi, IAIN Bone, Bone, 2022.

[2] Deffi Haryani, *Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, Vol.2, No.1 (2023).

[3] Firdaus, Taman, Rafiuddin Rafiuddin dan Mukrabin Mukrabin, *Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Oi Tui pada Masa Pandemi Covid-19 di Tinjau dari Perspektif*, J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah), Vol.4, No.2 (2021).

[4] Fajar Royan Safarullah, Ahmad Mulyadi Kosim dan Retno Triwoelandari, *Analisis Perencanaan Pelaksanaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus Dana Desa di Desa Sengon Kecamatan Tanjung, Brebes*, Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam. Vol.2, No.2 (2021).

Selanjutnya, pelaksanaan program harus dijalankan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama agar menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab sosial.[5] Untuk menjamin akuntabilitas, proses pemantauan dan evaluasi perlu dilakukan secara terbuka dan partisipatif, tidak hanya oleh lembaga formal desa, tetapi juga oleh elemen masyarakat yang peduli terhadap penggunaan anggaran publik.[6] Namun demikian, di berbagai daerah implementasi Dana Desa tidak selalu berjalan optimal. Permasalahan seperti rendahnya transparansi pengelolaan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, lemahnya mekanisme pengawasan, serta kendala administratif dan pelaporan menjadi tantangan yang sering dihadapi.

Persoalan-persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada efektivitas program, tetapi juga menimbulkan risiko pelanggaran hukum dan penyimpangan anggaran yang dapat merugikan masyarakat.[7] Kondisi serupa juga ditemukan di Desa Boro, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima. Desa ini memiliki potensi sumber daya alam dan sosial yang memadai untuk dikembangkan melalui Dana Desa. Namun berdasarkan observasi awal di lapangan, masih ditemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program. Pertama, minimnya keterbukaan informasi publik terkait alokasi anggaran mengakibatkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan Dana Desa.

Kedua, kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan program menimbulkan kesenjangan antara kebijakan dan kebutuhan riil masyarakat. Ketiga, lemahnya sistem pengawasan internal menyebabkan tidak optimalnya kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan. Keempat, hambatan dalam pelaporan administrasi menyebabkan keterlambatan dalam pencairan dana dan pelaksanaan program.[8]

---

[5] Putri Miftahul Jannah, *Output Pemanfaatan DD di Kecamatan Montasik dalam Tinjauan Milk Al-Daulah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Tahun Anggaran 2022-2023)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2024.

[6] Rahmadani, *Implementasi Program Keluarga Harapan dan Blt Dana Desa Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Palopo, 2022.

[7] Sri Nurindah Sari Arsyad dan Badu Ahmad, *Dinamika Kebijakan dan Implementasi Program Desa Maju: Studi Literatur dan Rekomendasi Kebijakan*, PAMARENDA: Public Administration and Government Journal, Vol.4, No.2 (2024).

[8] Alandino Kiesanto, *Implementasi Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Studi Kasus di Desa Pandian Kecamatan Sumenep)*, Skripsi, Universitas Islam Malang, Malang, 2022.

Lebih jauh, indikator kesejahteraan masyarakat di Desa Boro masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tantangan dalam bidang ekonomi, pendidikan, serta akses terhadap layanan kesehatan masih menjadi persoalan mendasar. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas program Dana Desa dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Dana Desa di Desa Boro, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima ditinjau dari perspektif hukum, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan Dana Desa dengan prinsip-prinsip hukum tata kelola keuangan desa, mengidentifikasi kendala yuridis maupun sosiologis yang muncul, serta menilai dampaknya terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan Dana Desa yang lebih efektif, transparan, dan partisipatif.

B. PEMBAHASAN

Penelitian ini mengambil objek pada pelaksanaan program Dana Desa di Desa Boro, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, sebagai representasi dari pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat lokal. Desa Boro merupakan salah satu desa pesisir dengan karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan perikanan. Sejak tahun 2015, desa ini telah mendapatkan alokasi Dana Desa yang cukup signifikan dari pemerintah pusat. Meskipun Dana Desa telah disalurkan secara rutin setiap tahun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat belum mengalami peningkatan yang berarti.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan adanya permasalahan mendasar dalam pengelolaan Dana Desa, yang tidak hanya bersifat administratif dan teknis, tetapi juga menyangkut aspek yuridis dan sosiologis. Beberapa persoalan yang mencuat antara lain: (1) kurangnya transparansi dalam penyusunan dan penggunaan anggaran desa; (2) minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan serta pengawasan; (3) lemahnya pengawasan internal; serta

(4) kendala dalam sistem pertanggungjawaban keuangan yang berdampak pada keterlambatan pencairan dana dan pelaksanaan program. Permasalahan tersebut menjadi relevan untuk dikaji dalam kerangka hukum, mengingat Dana Desa merupakan kebijakan publik yang dibiayai oleh anggaran negara dan pelaksanaannya tunduk pada peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2023 Desa Boro menerima Dana Desa sebesar Rp 1,2 miliar, dengan alokasi: infrastruktur Rp 650 juta, pemberdayaan masyarakat Rp 250 juta, sosial–kesehatan Rp 200 juta, dan pemerintahan desa Rp 100 juta. Dari 12 kegiatan yang direncanakan, hanya 8 yang terealisasi penuh, sisanya tertunda akibat keterbatasan laporan administrasi. Dampak terhadap kesejahteraan belum signifikan, terbukti dari tingkat kemiskinan Kecamatan Sanggar yang masih 14,2%, lebih tinggi dari rata-rata Kabupaten Bima yaitu 12,7%.

Bidang	**Anggaran (Rp)**	**Realisasi (%)**
Infrastruktur	650,000,000	80
Pemberdayaan Masyarakat	250,000,000	60
Sosial & Kesehatan	200,000,000	70
Pemerintahan Desa	100,000,000	100
Bidang	Anggaran (Rp)	Realisasi (%)

Tabel 1. Alokasi Dana Desa Desa Boro Tahun 2023
Sumber: Bahan Primer

Temuan lapangan menunjukkan lemahnya tata kelola. Kepala Desa menyatakan, “Keterbatasan SDM aparat desa sering membuat laporan Dana Desa tidak tepat waktu, sehingga pencairan tahap berikutnya tertunda.” Hal ini diperkuat oleh keluhan masyarakat, “Kami jarang dilibatkan dalam musyawarah desa, padahal program Dana Desa menyangkut kebutuhan kami.” Observasi peneliti juga mendapati partisipasi masyarakat dalam musyawarah hanya sekitar 25% dari undangan yang disebarkan. Dari sisi hukum, implementasi ini belum memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 82 dan Pasal 86 UU No. 6 Tahun 2014, serta ketentuan PP No. 60 Tahun 2014 Pasal 21–24 tentang mekanisme penggunaan Dana Desa. Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2020 juga mengatur prioritas pemulihan ekonomi dan kesehatan, tetapi sebagian program di Desa Boro belum diarahkan ke sana. Hambatan utama mencakup kapasitas aparatur desa yang lemah, rendahnya partisipasi, serta pengawasan BPD yang belum maksimal.

1. Implementasi Program Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Boro Kecamatan Sanggar Kab. Bima

Pelaksanaan program Dana Desa di Desa Boro telah berjalan sejak tahun 2015, sejalan dengan kebijakan nasional yang bertujuan mendekatkan pembangunan ke tingkat akar rumput.[9] Pemerintah Desa Boro menerima alokasi Dana Desa dari APBN setiap tahunnya dengan jumlah yang fluktuatif berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, yang mencakup aspek jumlah penduduk, kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis. Dana ini dialokasikan untuk mendanai berbagai kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), yang seharusnya disusun berdasarkan musyawarah desa secara partisipatif. Namun, dalam implementasinya, pelaksanaan Dana Desa di Desa Boro masih menghadapi sejumlah tantangan yang memengaruhi keberhasilannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa sebagian besar kegiatan yang dibiayai menggunakan Dana Desa masih terfokus pada pembangunan infrastruktur dasar seperti saluran irigasi, jalan lingkungan, dan fasilitas umum lainnya.[10]

Meskipun pembangunan infrastruktur memiliki manfaat langsung dalam meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan warga, orientasi pembangunan yang terlalu dominan pada fisik mengakibatkan terpinggirkannya program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta dukungan terhadap usaha mikro dan pertanian lokal. Kelemahan implementasi lainnya tampak pada proses perencanaan. Musyawarah desa sering kali hanya melibatkan perangkat desa dan tokoh tertentu, sementara masyarakat umum tidak diberi ruang yang cukup untuk menyampaikan aspirasinya. Akibatnya, prioritas penggunaan Dana Desa cenderung tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.[11]

---

[9] Martondi, *Optimalisasi Manajemen Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Jorong Situak Kecamatan Lembah Melintang)*, Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, Padang Sidempuan, 2022.

[10] Lamber, Arzat, Lisbeth Lesawengen dan Evelin Kawung, *Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kuma Kecamtan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud*, Jurnal Ilmiah Society, Vol.2, No.3 (2022)

[11] Deffi Haryani, *Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, Vol.2, No.1 (2023).

Proses perencanaan yang tidak partisipatif ini juga berdampak pada lemahnya pengawasan sosial dalam pelaksanaan kegiatan, karena masyarakat merasa tidak memiliki keterlibatan sejak awal.[12]

Di sisi administrasi, keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban dari desa kepada pemerintah kabupaten menjadi faktor penghambat pencairan tahap berikutnya.[13] Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam kapasitas manajerial aparatur desa yang berimplikasi langsung terhadap efektivitas pelaksanaan program. Lebih lanjut, keberhasilan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat seharusnya diukur dari indikator konkret, seperti peningkatan pendapatan masyarakat, berkurangnya angka pengangguran, serta bertambahnya unit usaha produktif. Namun, di Desa Boro, indikator-indikator tersebut belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Banyak program yang berjalan secara administratif, namun belum menghasilkan dampak sosial dan ekonomi yang substansial. Dari temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Dana Desa di Desa Boro belum sepenuhnya berjalan sesuai prinsip pembangunan partisipatif dan berkelanjutan. Tanpa penguatan pada sisi perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat, pelibatan warga, serta penguatan fungsi pemberdayaan, Dana Desa akan sulit mewujudkan peningkatan kesejahteraan secara nyata.

2. Faktor-Faktor Hukum yang Mempengaruhi Implementasi Program Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima

Pelaksanaan Dana Desa merupakan aktivitas hukum yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik.[14] Secara normatif, pelaksanaan Dana Desa diatur melalui serangkaian peraturan, mulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah,

---

[12] Teuku Al Ichsan, Safuridar Safuridar dan Rinaldi Syahputra, *Systematic Literature Review: Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Pembangunan Desa*, MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis, Vol.1, No.1 (2023).

[13] Lathifah Hani, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2020-2022 (Studi pada Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)*, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2023.

[14] Siska Etika Rahmat Waruwu, *Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lasarabaene*, Journal Economics and Strategy, Vol.4, No.1 (2023).

hingga Peraturan Menteri Keuangan dan Permendesa PDTT.[15] Namun, terdapat sejumlah faktor hukum yang memengaruhi implementasi Dana Desa di Desa Boro, baik secara struktural maupun kultural. Pertama, keterbatasan pemahaman terhadap regulasi menjadi faktor dominan. Banyak aparatur desa yang belum memahami sepenuhnya substansi regulasi pengelolaan keuangan desa, termasuk prosedur perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan.

Kondisi ini berpengaruh terhadap pelaksanaan program yang cenderung formalitas dan berorientasi administratif semata, tanpa memperhatikan prinsip-prinsip hukum secara substansial. Kedua, minimnya sosialisasi hukum kepada masyarakat juga menjadi penyebab lemahnya pengawasan. Masyarakat tidak diberikan pemahaman yang cukup mengenai hak dan kewajiban mereka dalam proses pembangunan desa, termasuk dalam hal mengakses informasi penggunaan anggaran desa. Akibatnya, masyarakat cenderung pasif dan tidak berdaya dalam melakukan kontrol sosial atas pengelolaan Dana Desa. Ketiga, ketidaktegasan dalam penegakan aturan juga menjadi kendala. Dalam beberapa kasus, ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi tidak disertai dengan sanksi atau pembinaan yang memadai.

Lemahnya pengawasan dari pihak kecamatan maupun inspektorat daerah menyebabkan pelanggaran administratif terus berulang tanpa koreksi sistematis. Keempat, belum optimalnya fungsi lembaga pengawasan internal desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam menjalankan fungsi kontrolnya. BPD yang seharusnya menjadi mitra kritis pemerintah desa sering kali kurang aktif atau bahkan tidak memiliki kapasitas hukum dan teknis yang cukup untuk menjalankan tugasnya secara independen dan objektif. Kelima, aspek kelembagaan juga menjadi faktor penting. Ketiadaan peraturan desa (Perdes) yang mengatur lebih lanjut prioritas penggunaan Dana Desa menyebabkan ketergantungan pada keputusan kepala desa dan perangkat desa yang kadang bersifat subjektif. Padahal, keberadaan Perdes yang aspiratif dan sesuai dengan kebutuhan lokal dapat memperkuat legitimasi hukum dalam pelaksanaan program.

[15] Andrianto Prabowo dan Tri Astuti Handayani, *Tinjauan Hukum: Hubungan Kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Jurnal Hukum Ius Publicum, Vol.5, No.1 (2024).

Keenam, kebiasaan birokratis yang masih sentralistis juga menjadi hambatan. Meskipun Dana Desa dimaksudkan untuk memperkuat otonomi desa, dalam praktiknya, desa masih sangat tergantung pada arahan dan verifikasi dari tingkat kabupaten atau kecamatan, sehingga memperlambat proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Dari berbagai faktor tersebut, tampak bahwa penguatan aspek hukum dalam implementasi Dana Desa merupakan kebutuhan mendesak. Tanpa reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas hukum, serta penguatan regulasi lokal yang berpihak pada partisipasi masyarakat, Dana Desa akan terus berjalan sebagai program administratif belaka tanpa memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Desa Boro belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan kewajiban Kepala Desa menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Pasal 26 ayat (4) huruf f), hak masyarakat untuk memperoleh informasi (Pasal 82), kewajiban pengelolaan sistem informasi desa (Pasal 86), serta fungsi BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat (Pasal 55). Fakta lapangan menunjukkan bahwa informasi APBDes tidak diperbaharui, partisipasi masyarakat dalam musyawarah hanya sekitar 25%, dan fungsi BPD masih pasif.

Selain itu, PP No. 60 Tahun 2014 mengatur penggunaan Dana Desa harus sesuai RKPDes dan APBDes (Pasal 21–24) serta laporan realisasi disampaikan tepat waktu, namun realisasi kegiatan di Desa Boro hanya 8 dari 12 program dan laporan keuangan kerap terlambat. Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2020 menekankan prioritas pada pemulihan ekonomi dan pencegahan stunting, tetapi alokasi bidang kesehatan hanya 16,7% dan program stunting belum maksimal. Sementara itu, Permendagri No. 20 Tahun 2018 mewajibkan bendahara menyusun laporan pertanggungjawaban secara rutin (Pasal 40–42), namun praktik di lapangan menunjukkan keterlambatan laporan yang menghambat pencairan tahap berikutnya. Dengan demikian, hambatan utama implementasi Dana Desa di Desa Boro tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga terkait lemahnya kepatuhan terhadap norma hukum yang mengatur tata kelola keuangan desa.

C. PENUTUP

Implementasi program Dana Desa di Desa Boro, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, secara normatif telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan teknis turunannya. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai kendala baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa masih minim, pengawasan internal belum berjalan efektif, dan orientasi kegiatan masih dominan pada pembangunan fisik tanpa diimbangi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Faktor-faktor hukum yang memengaruhi implementasi Dana Desa mencakup rendahnya literasi hukum aparatur desa, lemahnya penegakan regulasi, tidak optimalnya fungsi Badan Permusyawaratan Desa, serta belum kuatnya regulasi lokal seperti Perdes prioritas pembangunan. Selain itu, kebiasaan birokrasi yang bersifat top-down juga memperlambat inisiatif lokal dalam pengelolaan Dana Desa.

Dengan demikian, diperlukan pembenahan hukum secara menyeluruh yang mencakup penguatan kapasitas aparatur desa, optimalisasi regulasi lokal, peningkatan transparansi, serta pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa Dana Desa benar-benar menjadi instrumen transformasi sosial yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

Arsyad, Sri Nurindah Sari dan Badu Ahmad. *Dinamika Kebijakan dan Implementasi Program Desa Maju: Studi Literatur dan Rekomendasi Kebijakan*. PAMARENDA: Public Administration and Government Journal. Vol.4. No.2 (2024).

Firdaus, Taman, Rafiuddin Rafiuddin dan Mukrabin Mukrabin. *Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Oi Tui pada Masa Pandemi Covid-19 di Tinjau dari Perspektif*. J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah). Vol.4. No.2 (2021).

Haryani, Deffi. *Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora. Vol.2. No.1 (2023).

Ichsan, Teuku Al, Safuridar Safuridar dan Rinaldi Syahputra. *Systematic Literature Review: Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Pembangunan Desa*. MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis. Vol.1. No.1 (2023).

Lamber, Arzat, Lisbeth Lesawengen dan Evelin Kawung. *Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kuma Kecamtan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud*. Jurnal Ilmiah Society. Vol.2. No.3 (2022).

Prabowo, Andrianto dan Tri Astuti Handayani. *Tinjauan Hukum: Hubungan Kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.* Jurnal Hukum Ius Publicum. Vol.5. No.1 (2024).

Safarullah, Fajar Royan, Ahmad Mulyadi Kosim dan Retno Triwoelandari. *Analisis Perencanaan Pelaksanaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kasus Dana Desa di Desa Sengon Kecamatan Tanjung, Brebes*. Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam. Vol.2. No.2 (2021).

Waruwu, Siska Etika Rahmat. *Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lasarabaene*. Journal Economics and Strategy. Vol.4. No.1 (2023).

Karya Ilmiah

Hani, Lathifah. 2023. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2020-2022 (Studi pada Desa Way Lunik Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)*. Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

Jannah, Putri Miftahul. 2024. *Output Pemanfaatan DD di Kecamatan Montasik dalam Tinjauan Milk Al-Daulah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Tahun Anggaran 2022-2023)*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Kiesanto, Alandino. 2022. *Implementasi Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Studi Kasus di Desa Pandian Kecamatan Sumenep)*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Malang.

Martondi, Martondi. 2022. *Optimalisasi Manajemen Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Jorong Situak Kecamatan Lembah Melintang)*. Skripsi. Padang Sidempuan: IAIN Padangsidimpuan.

Rahmadani, Rahmadani. 2022. *Implementasi Program Keluarga Harapan dan Blt Dana Desa Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Barowa Kecamatan Bua Kabupaten Luwu*. Skripsi. Palopo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Selvia, Astiani. 2022. *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Labotto Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone)*. Skripsi. Bone: IAIN Bone.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.